

***INNOVATIVE GOVERNANCE* SEBAGAI STRATEGI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan oleh:

GRACE TESSA MAMANGKEY

NIM. 07011282025105

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
***INNOVATIVE GOVERNANCE* SEBAGAI STRATEGI INOVASI PELAYANAN**
PUBLIK DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Oleh :

Grace Tessa Mamangkey

07011282025105

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2024
Pembimbing,



Dr. Ardiyan Santawan, M.Si

NIP. 196511171990031004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**INNOVATIVE GOVERNANCE SEBAGAI STRATEGI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA
PALEMBANG**

Skripsi
Oleh :
Grace Tessa Mamangkey
07011282025105

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 21 Mei 2024

Pembimbing :

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

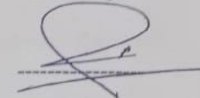
Tanda Tangan



Penguji :

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Tanda Tangan



2. Dian Anggraini, S.IP., M.Si
NIP. 198108142023212021



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Grace Tessa Mamangkey

NIM : 07011282025105

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul *“INNOVATIVE GOVERNANCE SEBAGAI STRATEGI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG.* adalah benar – benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan / atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh – sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun

Yang membuat pernyataan

Indralaya 6 Mei 2024



Grace Tessa Mamangkey

NIM 07011282025105

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui (Yeremia 33 : 3)

Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not. (Jeremiah 33:3 KJV)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Keempat orang tua tercinta
(Otniel Gideon Mamangkey,
Yenny Cristine Bolley, Ruth
Bolley, Yance Karel Umboh)
2. Kedua adik tercinta (Gilbert
Gamaliel Mamangkey &
Gloria Gabby Mamangkey)
3. Keluarga besar Mamangkey &
Bolley
4. Dosen pembimbing skripsi
saya (Bapak Dr Ardiyan
Saptawan M.Si)
5. Seluruh dosen dan Civitas
Akademika Fisip Unsri


ABSTRACT

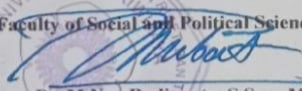
This research seeks to examine the execution and limitations of innovative governance as a strategy for enhancing public service innovation, led by the Regional Development Planning and Development Agency serving as an innovation facilitator in Palembang City. Utilizing benchmarking concepts derived from the Global Innovation Index and the Government Innovation Index of South Korea, the study employs data collection methods such as interviews, observations, and document analysis. The findings regarding the implementation of innovative governance as a strategy for public service innovation by the Regional Development Planning and Development Agency suggest that it has not been fully utilized due to the lack of inclination within Palembang City's Medium-Term Development Plan (RPJMD) to foster public service innovations. Although Commitment to Change is articulated through a declaration by the Mayor of Palembang and the Regional Secretary, there are no accompanying enforcement measures. Innovation rewards are only allocated within the framework of the best innovation competition. Notably, there is an absence of specific policies addressing public service innovation, and the human resource capacity lacks relevant competencies in innovation. While there is awareness of the importance of innovation at work, there is no dedicated budget for its implementation, and training opportunities related to public service innovation are lacking. Additionally, Corporate Social Responsibility (CSR) is not effectively utilized for innovation implementation, and the utilization of Information Technology (IT) within the agency's workflow remains suboptimal. Key obstacles include the absence of a visionary vision from the local government, the lack of specific funding, training initiatives for human resources in innovation, and the absence of proactive initiatives from the Regional Development Planning and Development Agency to drive public service innovations. Furthermore, there is a deficiency in establishing specific formations to cultivate innovation competencies within the agency.

Keywords : *Innovative Governance, Public Service Innovation, Regional Development Planning Agency and City Development*

Advisor

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si


NIP. 196511171990031004

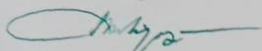
Palembang, Mei 2024
Head of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Science

Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala *innovative governance* sebagai strategi inovasi pelayanan publik yang dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan. Dianalisis menggunakan Konsep Benchmarking dari *Global Innovation Index* dan *Government Innovation Index Korea Selatan*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dari pelaksanaan *innovative governance* sebagai strategi inovasi pelayanan publik yang dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan adalah *innovative governance* belum dijadikan strategi inovasi pelayanan publik oleh Bappeda Litbang hal ini dikarenakan dalam RPJMD Kota Palembang tidak terdapat keinginan untuk melaksanakan inovasi pelayanan publik. Komitmen Perubahan dilakukan dalam bentuk deklarasi komitmen merupakan himbauan dari Walikota Palembang dan Sekretaris Daerah. Pemberian *reward* inovasi hanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan kompetisi inovasi terbaik. Tidak adanya kebijakan khusus yang dikeluarkan terkait inovasi pelayanan publik. Kapasitas Sumber daya Manusia belum memiliki kompetensi yang relevan dengan inovasi. Rasa kepedulian sudah dimiliki terhadap pentingnya inovasi dalam bekerja namun belum adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan inovasi. Tidak adanya pelatihan dan sejenisnya terkait inovasi pelayanan publik. Belum adanya penggunaan CSR dalam pelaksanaan inovasi di Bappeda Litbang. Penggunaan IT dalam sistem kerja belum dilaksanakan secara maksimal di Bappeda Litbang. Kendala yang dimiliki adalah pemerintah daerah tidak memiliki visi yang berisi gagasan untuk melaksanakan inovasi, komitmen untuk melaksanakan inovasi di masing – masing Organisasi Perangkat Daerah hanya berupa himbauan dalam bentuk deklarasi komitmen namun tidak disertai dengan sanksi, tidak ada dana khusus untuk pelaksanaan pembuatan inovasi, pengembangan inovasi, pelatihan terhadap sumber daya manusia inovasi, dan *reward* inovasi, tidak adanya inisiatif dari Bappeda Litbang untuk melakukan inovasi pelayanan publik, tidak adanya formasi khusus yang disediakan keterkaitan dengan kompetensi inovasi di Bappeda Litbang.

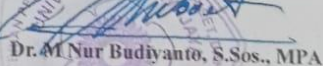
Kata Kunci : *Innovative Governance*, Inovasi Pelayanan Publik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

Pembimbing



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

Palembang, Mei 2024
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP 196911101994011001



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih, dan karunia yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi dengan judul *Innovative Governance* sebagai Strategi Inovasi Pelayanan Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang dapat diselesaikan dengan baik. SKRIPSI ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menempuh derajat S-1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Skripsi ini dibuat dengan seefektif dan seefisien mungkin, serta didorong dengan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keempat orang tua saya Otniel Gideon Mamangkey, Yenny Cristine Bolley, Ruth Niari Bolley dan Yance Karel Umboh yang selalu mendukung dalam doa dan memberi semangat dalam menyelesaikan proses perkuliahan.
2. Kedua adik saya Gilbert Gamaliel Mamangkey dan Gloria Gabby Mamangkey
3. Sepupu saya yang selalu memberikan semangat dan tempat bertukar cerita Aulia Sarah Pertiwi Bolley.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.

6. Bapak Dr Ardiyan Saptawan M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan pengertian yang sudah banyak membantu dan membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Ibu Dr. Hj. Lili Erina selaku dosen pembimbing akademik yang sudah membimbing dari awal perkuliahan sampai selesai.
8. Bapak/Ibu Dosen jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh pegawai pada bagian administrasi jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu saya dalam penyusunan berkas untuk keperluan akademik selama kuliah.
10. Seluruh pegawai Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang yang merupakan tempat penulis melaksanakan KKA yang sudah sangat memperlakukan saya dan rekan – rekan satu kelompok KKA seperti keluarga.
11. Seluruh pegawai Bagian Pengembangan dan Penelitian Bappeda Litbang yang sudah menerima dengan baik pada saat peneliti melaksanakan penelitian skripsi.
12. Seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 <i>Innovative Governance</i>	7
2.1.2 Strategi	17
2.1.3 Strategi Pemerintah	18
2.1.4 Inovasi Pelayanan Publik.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
1.2 Definisi Konsep.....	28
1.3 Fokus Penelitian	30
1.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
1.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
1.6 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian.....	36

4.1.1 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	36
4.1.2 Letak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang	36
4.1.3 Visi dan Misi Instansi.....	36
4.1.4 Tugas dan Fungsi	37
4.1.5 Struktur Organisasi.....	38
4.2 Hasil Penelitian.....	40
4.2.1 Visi Inovasi	40
4.2.2 Komitmen Perubahan	43
4.2.3 Reward bagi Inovator	48
4.2.4 Kebijakan Pendorong Inovasi	50
4.2.5 Kapasitas Sumber Daya Manusia	50
4.2.6 Kepedulian Sumber Daya Manusia Terhadap Inovasi	53
4.2.7 Pengembangan Sumber Daya Manusia Inovasi	54
4.2.8 Dukungan Anggaran	54
4.2.9 Penggunaan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Mendukung Inovasi	55
4.2.10 Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Kerja	56
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rekapitulasi Jumlah Partisipasi Peserta dan Proposal Koin Yanlik	5
Gambar 2 Struktur Organisasi Bappeda Litbang	19
Gambar 3 Misi Kota Palembang Tahun 2018 – 2023.....	43
Gambar 4 Deklarasi Pemerintah Kota Palembang.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2 Kerangka Berpikir.....	28
Tabel 3 Fokus Penelitian	32
Tabel 4 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Indikator Komunikasi dan Informatika..	54

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
Koin Yanlik	: Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
UU	: Undang - Undang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai seorang abdi masyarakat merupakan kewajiban bagi pelayan publik untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kewajiban adanya kesesuaian antara pelayanan publik yang diberikan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat jelas tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 yang mengamanatkan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang semestinya dilaksanakan sesuai dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat (UU Nomor 25 Tahun 2009, n.d.). Pemberian pelayanan publik pada prosesnya berdampak pada aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam menjalankan fungsi sebagai pemerintah.

Pada penerapannya yang ditemukan pada kehidupan bermasyarakat masih ditemukan pelayanan yang berbelit-belit, tidak efektif dan efisien, sulit dipahami, sulit dilaksanakan, tidak akurat, tidak transparan, tidak adil, birokratis, tidak profesional, tidak akuntabel, keterbatasan teknologi, keterbatasan informasi, kurangnya kepastian hukum, korupsi, kolusi, nepotisme, biaya tinggi, sentralistik, dan lemahnya kontrol masyarakat (Wakhid, 2017). Fenomena yang terjadi ini tidak mencerminkan pelayanan publik yang sesuai bagi kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan adanya perkembangan pada era globalisasi sekarang yang berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, termasuk juga sektor pelayanan publik yang menuntut pelayan publik untuk memberikan pelayanan dengan

harus mengikuti perubahan. Sektor publik diharuskan memberikan pelayanan publik yang meninggalkan budaya birokrasi lama dan menciptakan solusi inovatif. Melihat hal ini pelayanan publik harus memiliki rasa tidak mudah puas untuk selalu berinovasi agar memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas dan dapat bersaing dalam inovasi di dunia global. Sehingga perlu adanya upaya pemerintah melakukan tindakan yaitu adanya reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi tertuang dalam *ROAD MAP* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang telah disusun, ada delapan area perubahan yang ingin dicapai yakni (1) organisasi, (2) tatalaksana, (3) Peraturan Perundang – Undangan, (4) Sumber Daya Manusia Aparatur, (5) Pengawasan, (6) Akuntabilitas, (7) Pelayanan Publik, (8) Pola Pikir (*mind set*) dan budaya Kerja (*culture set*) aparatur (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2020). Sebagaimana yang telah disebutkan dalam salah satu area pelayanan publik menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sangatlah penting untuk melakukan perubahan dalam area pelayanan publik. Atas dasar keinginan melaksanakan reformasi birokrasi tersebut, yang dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki pemberian layanan publik dari tingkat Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah untuk terciptanya pemerintahan yang inovatif.

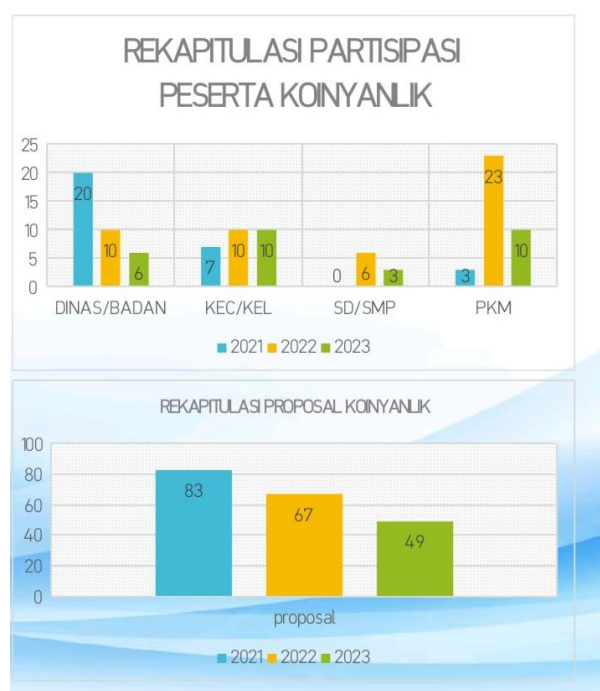
Pemerintahan inovatif atau *innovative governance* adalah suatu cara baru yang menjadi terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rahman dan Tarigan, 2020). Pelaksanaan Pemerintahan yang inovatif sangat diperlukan bagi pemerintah baik tingkat pusat hingga pemerintahan daerah agar menghasilkan inovasi pelayanan publik yang berdampak baik pada pelayanan publik yang diberikan. Pemerintahan yang

inovatif merupakan strategi agar terjadinya peningkatan inovasi pelayanan publik. Strategi merupakan bentuk atau rencana dimana terjadi proses mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh (Quinn 1999:10). Salah satu upaya untuk mendorong terjadinya pemerintahan yang inovatif dalam area pelayanan publik yaitu melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan gerakan *One Agency, One Innovation* (Satu Institusi , Satu Inovasi) yang bersifat wajib bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini sebagai bentuk dorongan dari kementerian untuk terciptanya terobosan inovasi dalam pelayanan publik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang (Bappeda Litbang) merupakan pembina inovasi yang ada di Kota Palembang, adapun tugas dan fungsi yang dilakukan adalah untuk berfungsi menghimpun seluruh inovasi yang ada di Kota Palembang dan melakukan pembinaan terhadap seluruh inovasi yang dibuat oleh organisasi perangkat daerah. Tetapi setiap tahunnya di Kota Palembang, pelaksanaan *one agency one innovation* terus mengalami penurunan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang inisial PD beliau menyampaikan “ *itu agak sulit ya, memang kota - kota lain strict soal punishment kalau di kota lain misalnya ga ada inovasi maka TPP OPD tersebut ditunda sampai dibuat inovasi ,tetapi dengan pertimbangan satu dan lain hal Perwako kita tidak sekeras itu tapi hanya berisi juknis untuk pengembangan inovasi dan untuk teguran via whatsapp saja ”*. Hal ini juga dapat dilihat dari pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik atau (Koin Yanlik) di Kota Palembang yang ditujukan kepada seluruh perangkat daerah untuk wajib

mengirim satu inovasi ditemukan permasalahan yaitu rendahnya partisipasi keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah dan unit layanan masyarakat untuk menciptakan inovasi . Rendahnya keikutsertaan OPD dalam kompetisi Koin Yanlik yang dalam artian menurunnya keinginan OPD untuk membuat inovasi. Hal ini sangatlah disayangkan mengingat kompetisi ini dibuat dalam rangka mendukung gerakan *One Agency One Innovation* yang seharusnya setiap OPD berupaya untuk membuat inovasi di setiap tahunnya yang bersifat wajib , tetapi justru mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat melalui data rekapitulasi jumlah partisipasi peserta Koin Yanlik.

Gambar 1. Rekapitulasi Jumlah Partisipasi Peserta dan Proposal Inovasi Koin Yanlik



Sumber : *Rekapitulasi Koin Yanlik Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang , 2023*

Dalam rekapitulasi partisipasi peserta Koin Yanlik, sangat jelas terlihat terjadinya penurunan keikutsertaan OPD . Pada tahun 2020 terdapat 83 proposal

inovasi yang terdaftar untuk mengikuti Koin Yanlik, lalu pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 67 proposal inovasi dan pada Tahun 2023 yaitu 49 proposal inovasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadinya penurunan pembuatan inovasi pada Organisasi Perangkat Daerah ruang lingkup pemerintah Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana *innovative governance* sebagai strategi inovasi pelayanan publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
2. Apa saja kendala *innovative governance* sebagai strategi inovasi pelayanan publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *innovative governance* sebagai strategi inovasi pelayanan publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang

2. Untuk mengetahui kendala *innovative governance* sebagai strategi inovasi pelayanan publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai *innovative governance* sebagai strategi inovasi pelayanan publik di Kota Palembang

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah, diharapkan menjadi masukan dan rujukan bagi instansi terkait *innovative governance* sebagai strategi inovasi pelayanan publik di Kota Palembang

Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai *innovative governance* sebagai strategi inovasi pelayanan publik di Kota Palembang

Bagi Akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan terutama mengenai *innovative governance* sebagai strategi inovasi pelayanan publik di Kota Palembang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bungin, B. 2013. *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran (1st ed.)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jones, Charles. O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mintzberg, Henry & James Brian Quinn, *The Strategy Process Concepts and Contexts*, New Jersey, Prentice Hall, Inc, 1995
- Mulgan, Geoff. 2008. *The Art of Public Strategy - Mobilizing Power and Knowledge For the Common Good*. New York: Oxford University Inc.S, 2012.
- Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model -Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Bumi Aksara Sugiyono. 2016 *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*: Bandung : IKAPI
- LAN. 2016. *Penyusunan Model Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah*. Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kedeputian Inovasi Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara : Jakarta
- Kusumaputri, Erika Setyanti (2015) *KOMITMEN PADA PERUBAHAN ORGANISASI (Perubahan Organisasi dalam Perspektif Islam dan Psikologi)*. Book . Deepublish, Yogyakarta. ISBN 978-602-401-122-2
- Suwarno, Yogi. (2008). *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN Press
- Abuddin, Nata. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sangkala. 2014. *“Innovative Governance Konsep dan Aplikasi”*. Yogyakarta : Capiya Publishing.
- Hustagalung, Simon Sumanjoyo dan Dedy Hermawan. 2018. *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Muluk, Khairul M.R. 2008, *“Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah”*. Malang: Banyumedia Publishing
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Santoso , Purwo. 2010. *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Research Center For Politics And Government Jurusan Politik Dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada

JURNAL

- Albury, David, "Creating the Conditions for Radical Public Service Innovation 1: Creating the Conditions for Radical Public Service Innovation." *Australian Journal of Public Administration* 70(3): 227–35, 2011.
- .Aziz Rizkil. (2015). Penerapan Pembentukan Website Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sebagai Wujud Innovative Governance (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang). 3(3).
- Wakhid, A. A. (2017). REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1619>. 2016 One Agency One Innovation dan Telaah Keilmuannya. Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi,
- Firiati R, Putra M.(2023) Tata Kelola Strategik Peningkatan Inovasi Daerah Kota Palembang 5(2). *Journal Of Government Innovation*. 308-326.
- Syam H, Patmasari E, Anugrah A(2021). Analisis Program One Agency One Innovation Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Wajo. 7(1). *Jurnal Administrasi Publik*
- Yusran W, Mamminanga I, Hasbi M.(2022). Analisis Gerakan One Agency One Innovation dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Wajo. 5 (3) *Journal of Management*. 104-110.
- Soeprapto, Riyandi. 2010. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance . World Bank.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulgan G. and Albury. 2003. Innovation in the Public Sector, Working Paper Version 1.9. Strategy Unit. United Kingdom Cabinet Office
- Sari Ni Putu Mirna, S. N. (2022). Innovative Governance dalam Pengelolaan Desa Digital (Studi Kasus: Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal,. 2.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Inovasi Pelayanan Publik

Keputusan Walikota Palembang Nomor 105 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2023

Keputusan Walikota Palembang Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Tim Sekretariat dan Tim Juri Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018 – 2023

Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024 – 2026

Peraturan Wali Kota Palembang No 24 Tahun 2023 Tentang Inovasi Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik

Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 332/KPTS/X/2023 Tentang Pemenang Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2023